Nama : Nabilah Nurkhalishah Al-Aidid

Nim : 10100119063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (B)

Tugas Pengganti UTS

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

1. Menurut saudara, apakah langkahh tim kuasa hukum Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar sudah tepat dengan menggugat hasil pemilihan umum/pemilihan kepala daerah ke PTUN? Jelaskan disertai dengan referensi.

Jawaban :

Menurut saya berdasarkan soal, langkah tim kuasa hukum Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar tidak tepat dengan menggugat hasil pemilihan umum/pemilihan kepala daerah ke PTUN, karena berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (PILKADA), yang didalam SEMA tersebut menyatakan bahwa : ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan " hasil pemilihan umum ". hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Dari isi SEMA Nomor 7 Tahun 2010 tersebut dapat kita lihat bahwa Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum. Dalam hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil dari pemilihan umum tidak dapat digugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sesuai dengan pasal 2 huruf g undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Dan Adapun Pasal 236 C yang menyatakan bahwa: Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan. Dengan demikian, kewenangan MK yang semula hanya memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden, DPR, DPRD, dan DPD menjadi bertambah dengan memutus

perselisihan hasil pemilihan. Jadi kesimpulannya jika ingin menggugat hasil pemilihan umum/pemilihan daerah diajukan ke mahkamah konstitusi.

Namun dalam artikel tersebut Yusril Isha Mahendra selaku kuasa hukum pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe - Faizal Amri Siregar mengajukan gugatan ke PTUN bukan tentang hasil pemilihan melainkan menggugat KPU Labuhan Batu sebagai pejabat TUN (tata usaha negara) telah mengeluarkan kebijakan yang salah. Yang dimana Yusril Isha Mahendra mengatakan KPU Labuhan Batu terburu-buru dalam menetapkan pasangan pemenang pilkada.

➤ Referensi :

- SEMA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA).
- Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Jika gugatan diajukan, apa yang menjadi objek sengketa? Jelaskan
Jawaban :

Berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (PILKADA), yang didalam SEMA tersebut menyatakan bahwa : Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, Jenis Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat atau dapat dijadikan sebagai objek sengketa dipengadilan tata usaha negara selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah memenuhi unsur KTUN yaitu sesuai dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Berdasarkan artikel penggugat ingin menggugat badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan penetapan Paslon pemenang ke Pengadilan TUN tanpa menunggu hasil putusan MK terlebih dahulu. Tindakan tersebut mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga tercipta ketidakpastian hukum. Tindakan KPU ini, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).